PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DINAS DAN BADAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, bertanggung jawab dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi serta kemampuan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu menata Organisasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 70);
 7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DINAS DAN BADAN KABUPATEN
TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Dinas adalah Dinas Daerah kabupaten Tulang Bawang;
- f. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- f. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat;
- j. Dinas perhubungan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan;
- m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- n. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- o. Dinas Pertanahan;
- p. Dinas pendapatan.

Bagian Pertama
DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Dinas Produksi dan Agribisnis ;
 - 1) Seksi Perbenihan
 - 2) Seksi Penerapan Teknologi Budaya dan Pengembangan Produksi
 - 3) Seksi Pemodalan dan Kemitraan
 - 4) Seksi Agroindustri dan Pemasaran
 - d. Sub Dinas Sumber Daya, Sarana dan Prasarana ;
 - 1) Seksi Optimalisasi Lahan dan Air
 - 2) Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
 - 3) Seksi perlindungan Tanaman
 - 4) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
 - e. Sub Dinas Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Ketahanan Pangan ;
 - 1) Seksi Pendidikan, Latihan dan Teknologi
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Tani
 - 3) Seksi Bimbingan Intensifikasi Masal
 - 4) Seksi Ketahanan Pangan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran i peraturan daerah ini.

Kedudukan

Pasal 4

Dinas pertanian tanaman pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 5

Dinas pertanian tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dinas pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pertanian tanaman pangan;
- d. Pengelolaan urusan ketata usaha dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas pertanian tanaman pangan di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan dan pelaksanaan urusan administrasi.

Cabang Dinas

Pasal 8

- (1) Cabang dinas pertanian tanaman pangan adalah unsur pelaksana dinas pertanian tanaman pangan melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang dinas pertanian tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas cabang dinas pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan dan melaksanakan urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Umum:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Produksi.
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi.
 - 3) Seksi Agroindustri dan Pemasaran Hasil.
 - 4) Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman.
 - d. Sub Dinas Kehutanan:
 - 1) Seksi Penatagunaan Hutan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Keamanan Hutan
 - 3) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil
 - 4) Seksi Jonservasi dan Penyuluhan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Kelompok Jabatn Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas perkebunan dan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 11

Dinas perkebunan dan kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 12

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perkebunan dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- d. Pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.